



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kajari: KN Ditaksir Capai Ratusan Juta

**Dugaan Korupsi DD
Desa Bukit Harapan**

MUKOMUKO –Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Agus Irawan Yustisianto, SH, MH, tak menampik taksiran kerugian negara (KN) dan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Air Rami, mencapai ratusan juta rupiah.

Kajari enggan menyebut estimasi KN, karena sampai sekarang menunggu hasil audit resmi terlebih dulu.

“Akan berkoordinasi dahulu, dan minta tim ahli dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangu-

nan (BPKP) untuk lakukan audit kerugian negara. Perkiraan awal penyidik, dugaan kerugian negara capai ratusan juta rupiah,” papar Kajari.

Dipastikan penanganan kasus dugaan Tipikor di Desa Bukit Harapan, sudah ditingkatkan statusnya. Dari penyelidikan (Lidik) naik ke penyidikan (Lid).

Karena itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut dipastikan ada. Tentunya ini berdasarkan dari hasil penyidikan yang disertai keterangan dan bukti-bukti berdasarkan hukum yang berlaku.

Dijelaskan Kajari modus dalam kasus dugaan Tipikor ini diduga kuat telah terjadi mark up dan fiktif dalam

penggunaan dana desa (DD) di desa itu. “Jadi dapat dipastikan akan ada kelanjutan untuk pengusutan kasus itu,” imbuh Kajari.

Lebih lanjut dikatakannya sebelumnya pihak Pemdes dan pengelola dana tersebut sudah diingatkan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tapi tdiak diindahkan, maka jaksa terpaksa melakukan penegakan hukum.

“Ini juga sebagai bukti bahwa meski sudah ada MoU dengan TP4D, tidak menjadi jaminan yang melanggar hukum akan kebal hukum. Ini meskipun ada pendampingan dari TP4D. Kita tegaskan, siapapun yang melanggar

hukum pasti ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kajari.

Lebih lanjut dijelaskan ada belasan saksi telah dimintai keterangannya dalam perkara tersebut. Mulai kepala desa, perangkat desa, PNS di OPD serta pihak terkait lainnya. Tidak menutup kemungkinan saksi-saksi tersebut nantinya akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Dalam waktu dekat bakal diketahui siapa saja oknum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya dugaan korupsi itu. Dari audit nanti akan diketahui detail sumber kerugian negara yang muncul,” demikian Agus. (hue)